

Reformasi Kepegawaian: Analisis Kebutuhan, Analisis Beban Kerja dan Sistem Penilaian Kinerja

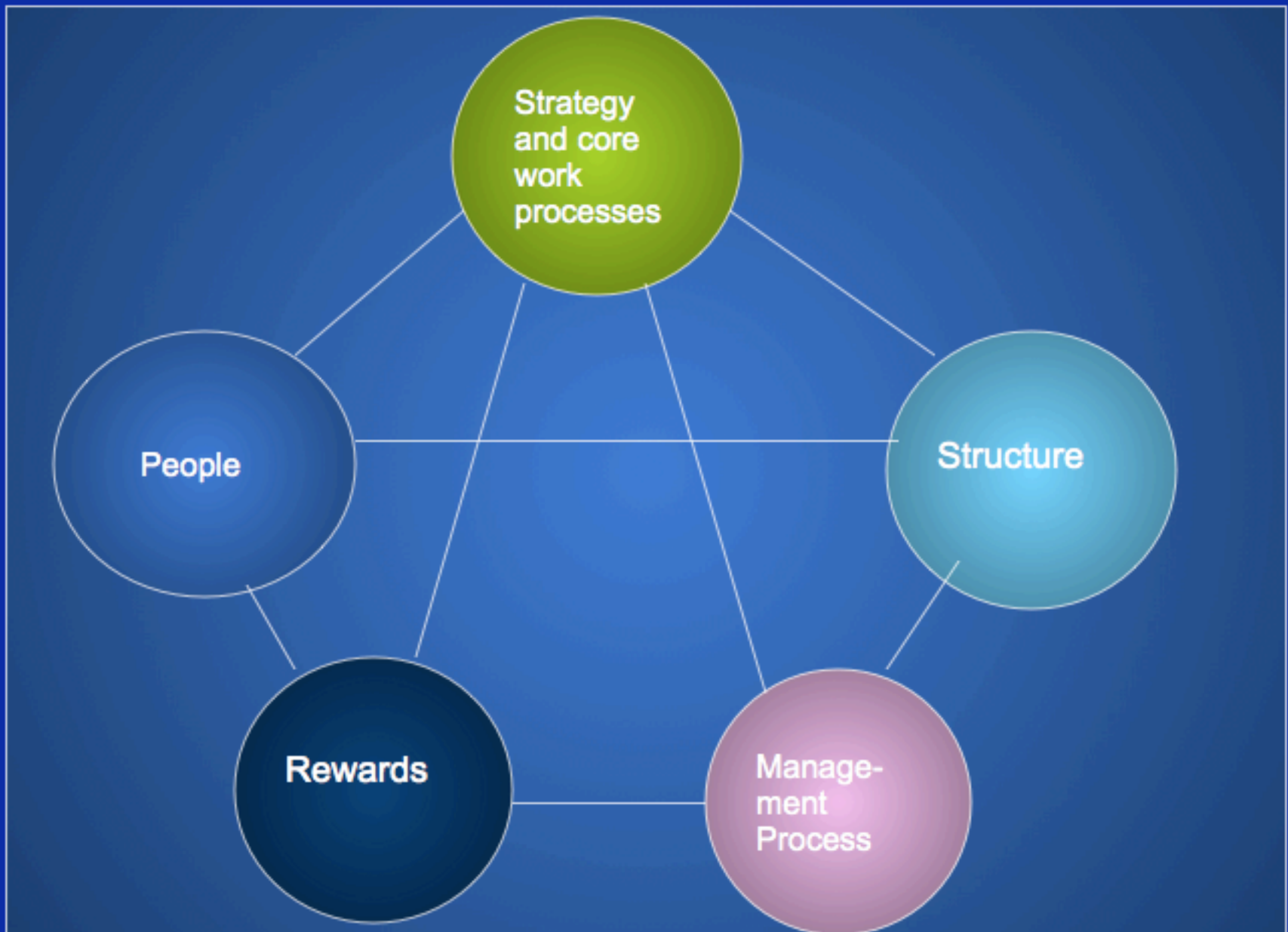


Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

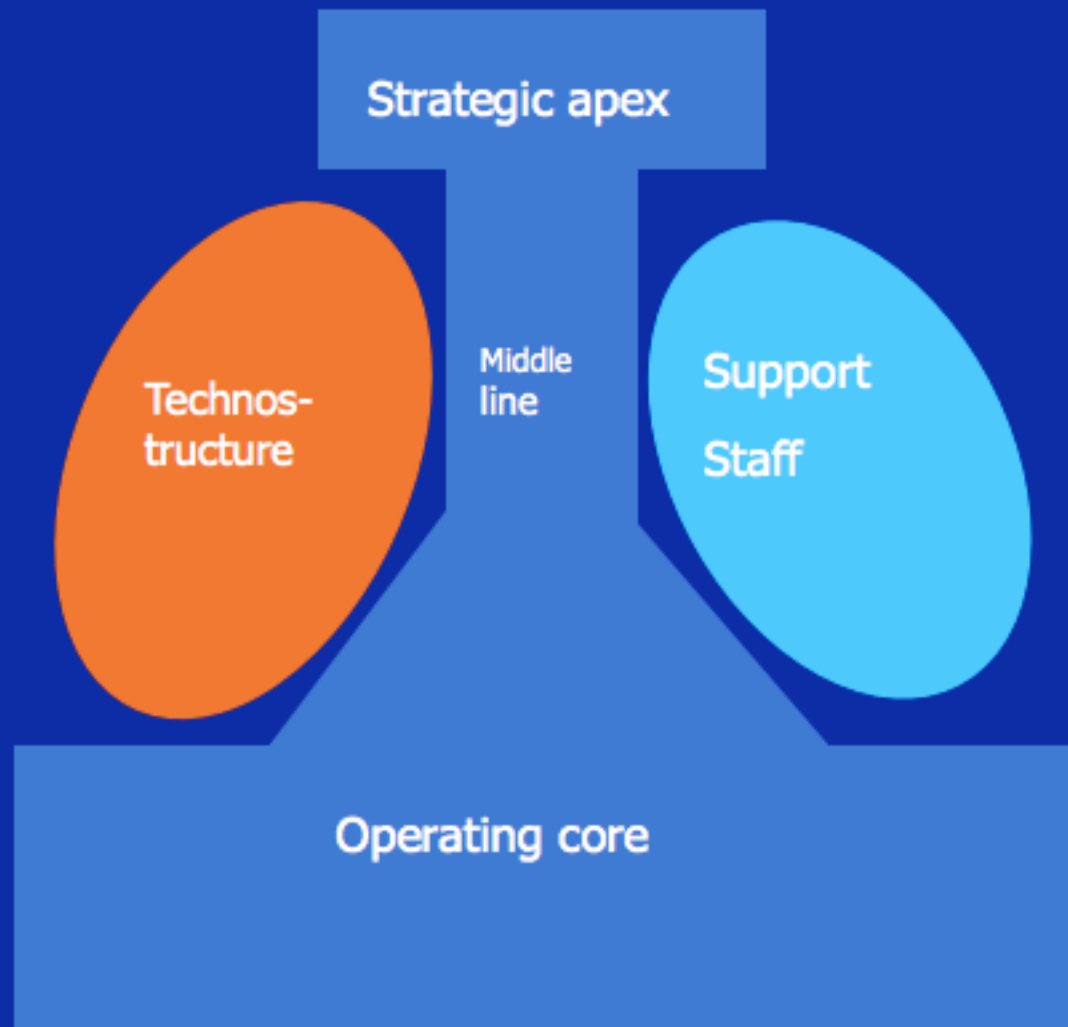
www.kumoro.staff.ugm.ac.id

081 328 488 444

Strategi Organisasi Sebagai Determinan Struktur



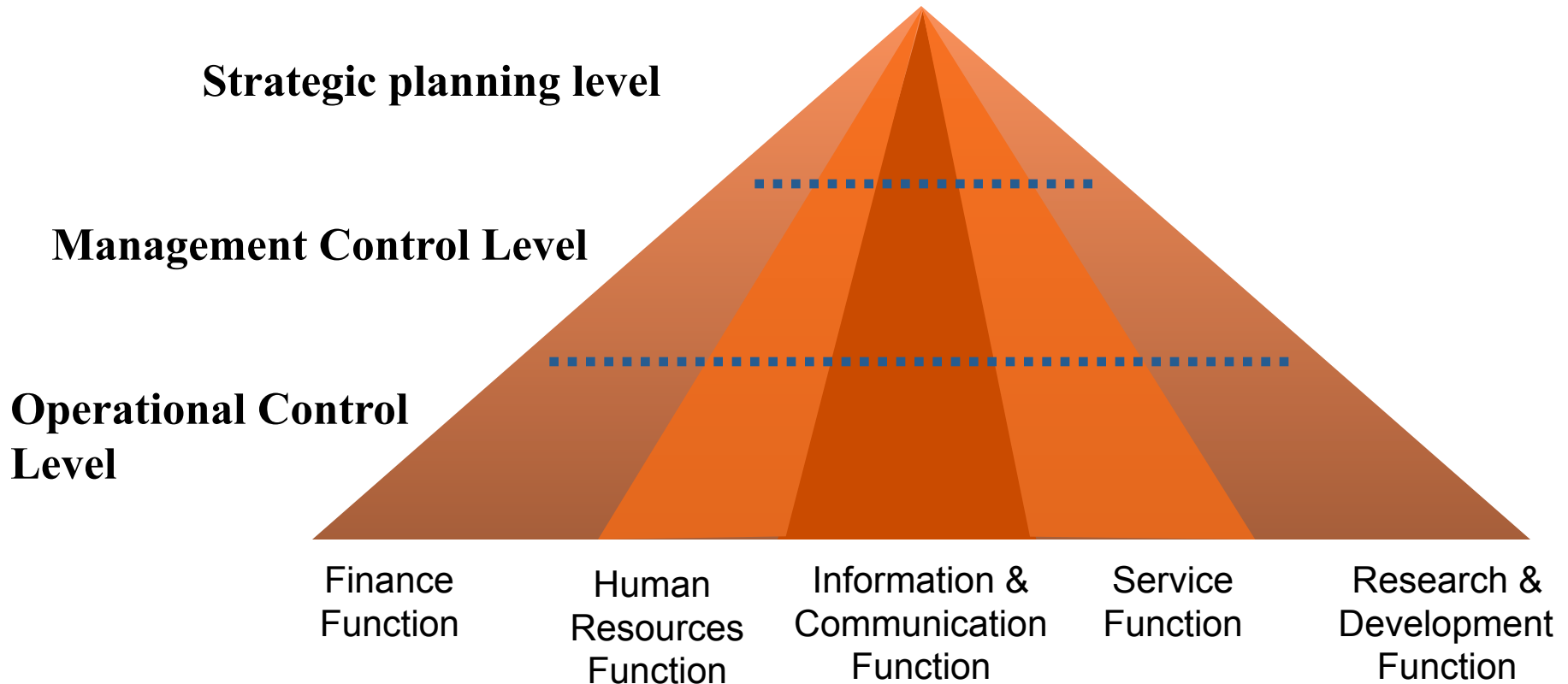
Struktur Dasar Organisasi



Peraturan ttg Kepegawaian di DIY

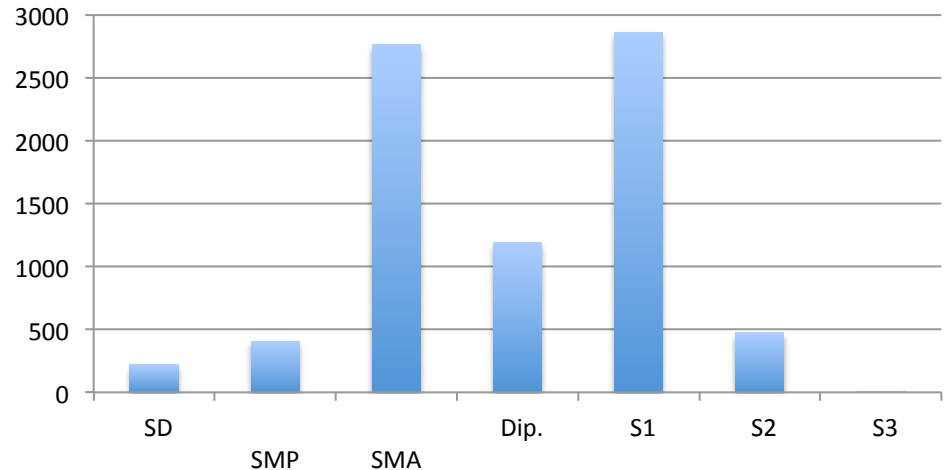
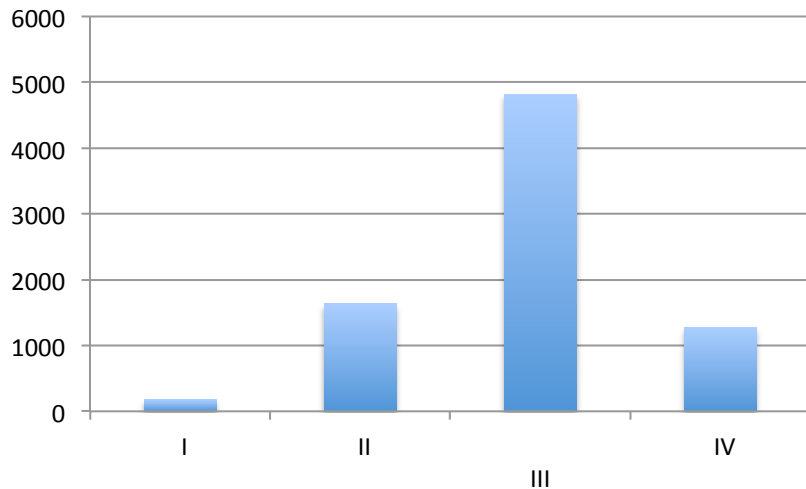
1. Pergub No.36/2008 ttg kepegawaian untuk UPT (Unit Pelaksana Teknis)
2. Pergub No.66/2008 ttg kualifikasi untuk jabatan struktural
3. Pergub No.67/2008 ttg kualifikasi untuk Jabatan Fungsional Umum
4. Pergub No.68/2008 ttg kualifikasi untuk Jabatan Fungsional Tertentu
5. Pergub No.9/2011 ttg BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Kebutuhan SDM Menurut Jenjang Organisasi



Struktur Kepegawaian Prov DIY

	Menurut Golongan				Menurut Tingkat Pendidikan						
	I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	Dip.	S1	S2	S3
Jmlh	184	1633	4816	1275	218	406	2764	1187	2856	474	3
%	2,33	20,65	60,90	16,12	2,75	5,13	34,95	14,97	36,11	5,32	0,04



Catatan: Jumlah Pegawai Pemprov: 7908 orang

Sumber: Data Bezetting Kepegawaian Tahun 2010, BKD

Rekap Kebutuhan Pegawai

No.	SKPD	Struktural	Fungsional Umum		Fungsional Tertentu	Total
			Nama Jabatan	Perk. Kebutuhan		
1	Setda / Setwan	115	356	644	14	773
2	Distan	21	84	162	5	208
3	Dis Kelautan	17	67	132	6	155
4	Dishutbun	21	84	174	43	238
5	Dispora	21	80	182	6	209
6	Disbud	16	53	83	-	99
7	Dispar	16	50	102	5	123
8	Disos	21	92	204	-	225
9	Diskes	21	74	206	10	237
10	Disnakertrans	21	82	201	4	226
11	Dis PU & ESDM	29	107	522	11	562
12	Diskominfo	23	93	248	7	278
	Total	342	1222	2860	111	3333

Jabatan Fungsional Tertentu

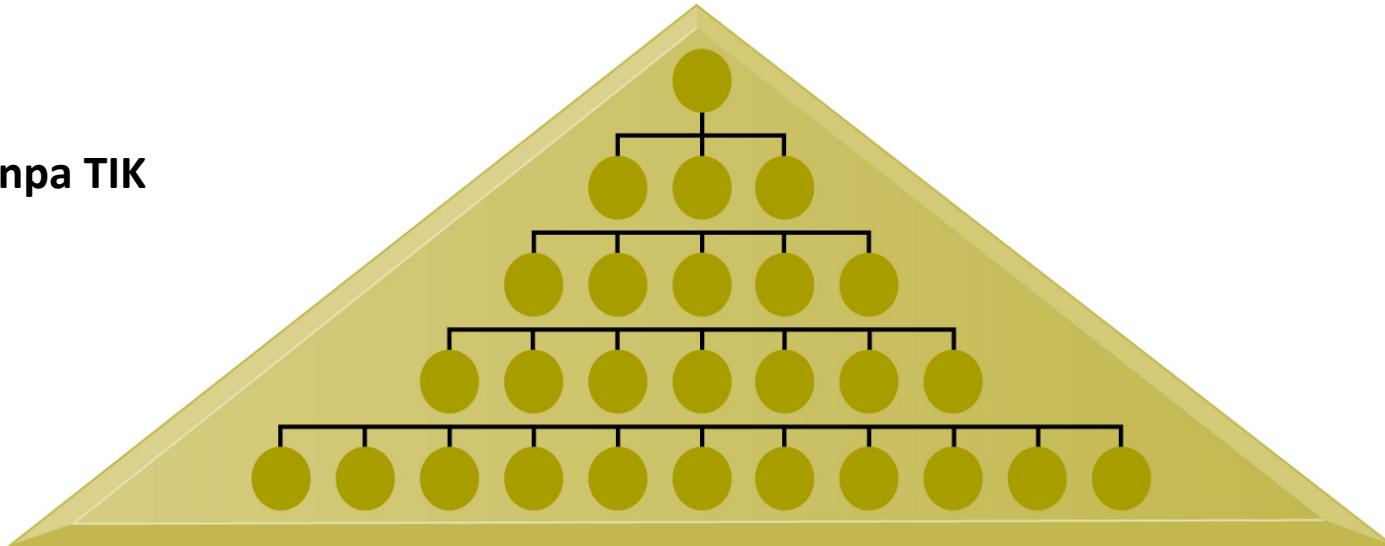
1. Analis Kepeg.	16. Pranata Komputer	31. Pgws Benih Ikan	46. Pekerja Sosial
2. Arsiparis	17. Perencana	32. Pgws Perikanan	47. Perekam Medis
3. Auditor	18. Peneliti	33. Pgws Farmasi	48. Pgd.Dampak Lingk
4. Apoteker	19. Pamong Belajar	34. Pgws Mut Pakan	49. Pgws MHasil Pert.
5. Asisten Apoteker	20. Pamong Budaya	35. Peranc. Perund.	50. Radiografer
6. Bidan	21. Penyuluh Perind.	36. Pranata Humas	51. Sanitarian
7. Dokter	22. Penera	37. Pmdik Veteriner	52. Tekn Elektromedis
8. Dokter Gigi	23. Tekn Pen.& Rekayasa	38. Pgd. Ekost Hut	53. Teknisi Pengairan
9. Pustakawan	24. Pengawas Keten.	39. Polisi Kehutanan	54. Teknisi Jl & Jemb.
10. Entemolog Kshtn	25. Pengawas Sekolah	40. Peny. Kehut.	55. Teknisi Tata Bang.
11. Epidemiolog Kshtn	26. Penyuluh Pertanian	41. Peny. Kes. Masy	56. Tekn Peny. Lingk.
12. Guru	27. Pgd. Pengg. Tumbhn.	42. Pengantar Kerja	57. Widyaiswara
13. Instruktur	28. Pgws Benih Tanaman	43. Perawat	
14. Medik Veteriner	29. Pgws Bibit Ternak	44. Perawat Gigi	
15. Nutrisionis	30. Pgd. Hama Ikan	45. Prnt Lab Ksht	

Masalah Umum Kepegawaian Daerah

1. Spesialisasi jabatan kurang sesuai dengan beban kerja (Jmlh Jabatan Fungsional secara nasional hanya 72 → Pergub 68/2008: 57 JFT).
2. Persyaratan kompetensi masih terlalu umum, kurang menekankan pada profesionalisme (ijazah terakhir, pelatihan penjenjangan, masa kerja).
3. Penilaian kinerja individual kurang sistematis (TKD / TPP, apakah sudah mengarah kepada kinerja individu?)
4. Beban kerja tidak terbagi secara merata dengan spesialisasi yang jelas.
5. Proses kerja kurang mengutamakan perangkat teknologi dan efisiensi.

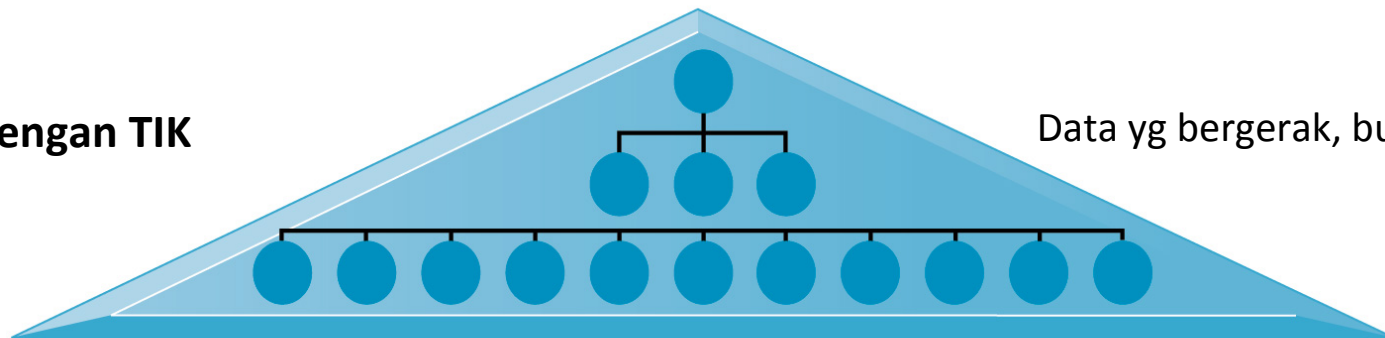
TIK dan Hierarki Organisasi

Tanpa TIK



A traditional hierarchical organization with many levels of management

Dengan TIK



Data yg bergerak, bukan orang.

An organization that has been "flattened" by removing layers of management

Klasifikasi Umum Kegiatan Pemda

- Pelatihan.
- Diklat;
- Fasilitasi, pendampingan;
- Pemberdayaan;
- Pembinaan;
- Penyuluhan;
- Sosialisasi & diseminasi;
- Pelayanan langsung masyarakat;
- Koordinasi;
- Penyusunan dokumen;
- Pendataan. pemetaan;
- Penelitian/studi/kajian;
- Monev. inspeksi dan pelaporan;
- Pengawasan. pengendalian;
- Pemberian bantuan;
- *Event Organizer* (lomba. kontes. pameran. dll)
- Pembentukan/pendirian lembaga/badan/dll;
- Penataan lokasi. kawasan. dsb
- Pengelolaan kawasa, limbah. ekosistem. dll
- Pembangunan fisik: jalan. Jembatan, gedung. ruang. rumah, pagar, taman, irigasi. dll;
- Pengadaan barang modal lainnya;
- Pemeliharaan rutin/berkala aset daerah;
- Rehabilitasi aset daerah;
- Penyediaan barang & jasa;
- Dll

Alokasi Belanja di Daerah Kurang Efektif

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	% Penyelesaian Kegiatan		
		TW 1	TW 2	TW 3
215	1283	0,25	3,10	11,05
		(3 kegiatan)	(41 kegiatan)	(142 kegiatan)

Catatan Tim Money Pemprov DIY :

1. Deviasi antara target dan realisasi (fisik & keuangan) sangat lebar, deviasi keuangan tertinggi 38,95%, Deviasi Fisik tertinggi 25,69% yang keduanya terjadi pada Triwulan III.
2. Pada Triwulan 4 harus menyelesaikan 1141 kegiatan
3. Kondisi yang demikian apakah sudah cukup baik dari sisi perencanaan?

Mengapa kemampuan pegawai kurang mendukung perencanaan dan alokasi anggaran yg efektif dan efisien?

Rekap Situasi Kepegawaian Prov DIY Th 2010

Nama Organisasi Dan Jabatan	Jmlh Peg Per 31 Des '09	Kebthn 2010	Kurang	Lebih	Masuk BUP	Usulan Formasi
2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Seluruhnya	7,593	9,025	2,426	1,349	341	2,817
Biro Umum, Humas Dan Protokol	177	247	78	6	5	82
Biro Tata Pemerintahan	76	82	15	3	2	16
Biro Hukum	57	92	34	2	2	36
Biro Administrasi Kesra Dan Kemasyarakatan	58	56	9	11	2	11
Biro Administrasi Perekonomian Dan Sda	50	51	4	6	2	6
Biro Administrasi Pembangunan	45	52	10	2	3	10
Biro Organisasi	47	54	11	1	2	11
Sekretariat DPRD	93	135	46	2	2	46
Dinas Kelautan Dan Perikanan	158	301	146	3	3	171
Dinas Kesehatan	530	662	148	14	33	134
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Esdm	585	744	277	66	48	287
Dinas Kehutanan Dan Perkebunan	417	551	134	2	15	427
Dinas Pertanian	451	674	245	22	12	237
Dinas Sosial	360	542	193	17	26	168
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	323	455	141	32	10	141

Nama Organisasi Dan Jabatan	Jmlh Peg Per 31 Des'09	Kebthn Peg 2010	Kurang	Lebih	Msk BUP	Usulan Formasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	275	342	75	11	10	37
Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	1422	874	108	998	54	247
Dinas Kebudayaan	209	284	100	27	13	50
Inspektorat	99	131	38	4	10	16
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat	91	100	9	1	4	13
Badan Kepegawaian Daerah	104	150	48	3	4	44
Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah	178	223	38	11	1	36
Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	101	113	27	13	13	29
Badan Lingkungan Hidup	71	115	44	0	2	45
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	117	113	5	9	4	8
Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal	99	185	88	2	4	84
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	119	150	37	4	7	40
Badan Pendidikan Dan Pelatihan	92	111	24	6	2	32
Satuan Polisi Pamong Praja	135	165	35	5	4	37
Rs Grhasia	302	394	85	10	4	100

Isu Strategis Kepeg Prov DIY

1. Standar kompetensi, analisis beban kerja, dan rencana penempatan pegawai memerlukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar SKPD.
2. Perhitungan standar kompetensi dan penilaian kebutuhan pegawai hendaknya mengutamakan profesionalisme dan prediksi hingga 5-10 th ke depan.
3. Pemerintah Provinsi DIY perlu mengantisipasi RUU ASN dan perubahan kedudukan provinsi.
4. Kebutuhan layanan publik di DIY hendaknya menjadi tolok-ukur bagi reformasi kepegawaian, analisis beban kerja dan rencana rekrutmen pegawai. → Moratorium hendaknya dimanfaatkan untuk analisis kepegawaian yang rasional, bukan untuk ancang-ancang merekrut lebih banyak tanpa dasar yg objektif.

Terima Kasih